

## Jukir Diminta Longgar Hati dan Sopan

**SALATIGA (KR)** - Ratusan juru parkir (jukir) di Salatiga diminta untuk mengedepankan kelonggaran hati dan sopan serta menjaga sikap. Selain itu, jukir harus bisa mengendalikan diri tidak boleh emosi bila mendengar kalimat tidak enak dari pengguna jalan yang merasa terganggu. "Tolong saat mengatur jalan yang padat apalagi perayaan tahun baru agar bisa mengendalikan diri, meski ada ucapan yang tidak enak didengar. Jadikan itu menjadi lahan sedekah, sedekah longgarnya hati dalam memberikan pelayanan parkir," pesan Pj Walikota Salatiga Sinoeng N Rachmadi saat bertemu jukir di Kantor Dishub Salatiga, Rabu (28/12). Pada kesempatan ini, Sinoeng juga meminta kepada dinas agar bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Salatiga untuk rutin cek kesehatan bagi jukir.

Kemudian juga seragam untuk diperbaharui agar lebih caket. Sedangkan Kepala Dishub Salatiga, Sri Satu mengatakan jukir adalah bagian dari Pemerintah Kota Salatiga yang memiliki tugas membantu Dishub memenuhi target PAD. Ia berpesan, yang harus dipedomani adalah dalam bertugas di lapangan selain membantu target PAD juga tetap jaga keselamatan pengguna jalan. "Jadi perhatikan betul lahan parkir jangan mengganggu orang yang lewat," katanya. (Sus)-f

## Pemkab Boyolali Miliki Gedung Pancasila

**BOYOLALI (KR)** - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) Kabupaten Boyolali menerima hibah gedung dua lantai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) kabupaten setempat. Pembangunan gedung yang menghabiskan dana sebesar Rp 1,6 miliar tersebut diberi nama gedung Pancasila.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Boyolali, Arif Budi Noeryanto mengatakan, gedung Pancasila tersebut terdiri dari dua lantai, lantai dasar diperuntukan gedung serbaguna dan lantai dua untuk sekretariat organisasi masyarakat (Ormas) dan ruang interjele. "Gedung serba guna pada lantai bawah bisa digunakan berbagai kegiatan dan lantai dua untuk sekretariat Ormas," kata Arif, Kamis (29/12).

Arif menjelaskan, bahwa gedung Pancasila tersebut pada 19 Desember telah ditetapkan Perda No 18 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. "Jadi gedung ini nantinya sebagai tempat berkumpul dan berdiskusi untuk menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan Pancasila pada generasi berikutnya," katanya. Terbangunnya gedung Pancasila ini terinspirasi dari, Pancasila adalah sebagai lambang negara. Kalau kita lihat nilai nilai Pancasila di kalangan muda saat ini agak menurun, sehingga pemerintah segera menyusun perda Pancasila.

Bupati Boyolali M Said Hidayat mengatakan, bahwa sampai saat ini baru kabupaten Boyolali yang memiliki perda yang pertama yakni, tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Perda tersebut tertuang pada No 18 Tahun 2022. "Ya, perda tentang wawasan kebangsaan dan Pancasila ini baru dimiliki kabupaten Boyolali," kata Said Hidayat. Bupati berharap, gedung tersebut segera dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai ruang diskusi, komunikasi serta berbicara membangun nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan. (R-3)-f



Bupati Boyolali M Said Hidayat meresmikan Gedung Pancasila.

## Ketep Pass Dilengkapi Menara Pandang

**MAGELANG (KR)** - Daya Tarik Wisata (DTW) Ketep Pass yang berada di dataran tinggi Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, menjadi destinasi wisata unggulan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang. Awal tahun 2023, DTW Ketep Pass di lengkapi menara pandang dengan ketinggian sekitar 9 meter menjulang ke langit.

"Dengan menara pandang yang baru ini, wisatawan bisa menyaksikan indahnya alam pegunungan di kaki gunung, termasuk puncak Gunung Merapi dan puncak Gunung Merbabu," kata Direktur Badan Pengelola Objek Wisata (BPOW) Ketep Pass Magelang, Mul Budi Santoso, di Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, Jumat (30/12).

DTW Ketep Pass, dilengkapi dengan menara pandang dengan ketinggian lebih dari 9 meter di atas dataran tinggi Ketep. Gardu pandang yang dibangun dengan nilai proyek Rp 3,6 miliar, menjadi menambah lengkapnya fasilitas untuk wisatawan guna menikmati indahnya alam kawasan lereng Gunung Merapi, merupakan gunung teraktif di Indonesia.

Ketep Pass mendapatkan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membangun sejumlah fasilitas. Dana tersebut, digunakan untuk membangun tambahan fasilitas yaitu 10 kios UMKM yang diharapkan dapat menjadi etalase produk-produk UMKM Kabupaten Magelang utamanya oleh-oleh. Ada juga 5 kios kuliner yang akan dibangun nanti dapat melayani tamu yang middle.

Untuk menuju menara pandang yang mulai dibuka per tanggal 1 Januari 2023, adalah melewati skywalk. Skywalk itu panjangnya sekitar 16 meter bisa untuk selfie yang akan menghubungkan dari prasasti Ketep Pass ke lantai dua gardu pandang. "Yang jelas, wisatawan dapat melihat 360 derajat pemandangan dari Ketep Pass," jelas Mul Budi Santoso yang biasa dipanggil Bodrek.

Ada beberapa puncak gunung yang bisa dilihat dan dinikmati, yakni puncak Gunung Merbabu, Merapi, Sindoro, Sumbing, Slamet, Telomoyo dan Andong. Tujuh puncak gunung, bisa dilihat dari titik atau dari Menara Pandang tersebut. Tahun baru 2023, menjadi momentum bagi wisatawan untuk datang ke destinasi Ketep Pass. Sedangkan untuk naik ke gardu pandang, tiketnya Rp 5 ribu per orang. (Bag)-f

## Baznas Kota Semarang Salurkan Zakat

**SEMARANG (KR)** - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Semarang laksanakan Pentasharufan Massal Akhir 2022 sebesar Rp 2 miliar. Dana tersebut bersumber dari zakat, infak dan sedekah yang dikumpulkan dari ASN dan masyarakat di Kota Semarang.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Kota Semarang, Jumat (30/12). Hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang Mukhammad Khadik mewakili Pj Walikota Semarang Ir Hevearita G Gunaryanti MSos, Ketua Baznas Kota Semarang H Amaz Agung Andrarasmara serta Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan.

Ketua Baznas Kota Semarang Amaz menyampaikan bahwa Baznas merupakan lembaga pemerintah non struktural yang memiliki tugas mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah

sebanyak-banyaknya dan menyalurkan seluas-luasnya untuk kebermanfaatannya bagi umat.

Awal Maret 2020 pemerintah mengumumkan adanya wabah Covid-19, disaat pemerintah kebingungan karena belum ada payung hukum dalam penganggaran, Baznas menjadi lembaga filantropi Islam yang memiliki alternatif solusi dalam membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Khusus Kota Semarang lebih dari Rp 8 milyar anggaran yang dikeluarkan untuk membantu penanganan Covid-19 diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan hidup berupa sembako, was-tafel portabel, penyemprotan disinfektan sampai membantu peti mati bagi jenazah Covid-19.

Di penghujung akhir tahun 2022 ini, Baznas Kota Semarang menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah lebih dari Rp 2 milyar yang

terdiri dari Rp 1,6 milyar disalurkan bersama dengan UPZ Tingkat untuk asnaf miskin dan fii sabillillah dalam membantu Pemerintah Kota Semarang dalam menekan laju inflasi di Kota Semarang.

Selain itu disalurkan asnaf amil bagi UPZ Tingkat Kota dan Kecamatan sebesar Rp 500 juta rupiah, terang amaz. Pj Walikota Semarang dalam sambutannya yang di bacakan Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang Mukhammad Khadik, mengungkapkan bahwa zakat merupakan kewajiban dalam rukun Islam yang harus ditunaikan bagi setiap muslim.

Besaran yang harus di keluarkan sebesar 2,5% dari penghasilan yang diperoleh, maka peran penting zakat sangat signifikan dalam membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Semarang.

Kami mendorong agar ASN di Pemerintah Kota Semarang untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga resmi pemerintah yakni Baznas Kota Semarang.

Lebih lanjut di katakan Khadik, bahwa tidak ada sejarahnya orang yang membayar zakat jatuh miskin, yang ada justru kehidupan sosial ekonominya meningkat. Kami mengapresiasi langkah-langkah

Baznas yang terus membantu pemerintah dalam percepatan pengentasan kemiskinan di Kota Semarang. Kami dari Pemerintah Kota Semarang merasakan betul manfaat hadirnya Baznas di masyarakat. Di antaranya kecepatan dalam membayar zakat jatuh miskin, yang mana tentu polanya berbeda dengan anggaran yang ada di pemerintah. (Cha)-f



Penyaluran zakat senilai Rp 2 miliar oleh Baznas Kota Semarang guna tekan inflasi.

## Digelontorkan Dana Insentif Guru Ngaji

**SEMARANG (KR)** - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menggelontorkan dana APBD Jateng sebesar Rp Rp 247,6 miliar untuk insentif guru ngaji dan Madrasah Diniyah (Madin) tahun anggaran 2022.

Dengan demikian, 206.302 guru ngaji dan guru Madin bakal mendapat insentif sebesar Rp 1,2 juta untuk tahun ini (2022). Demikian dikatakan Ganjar Pranowo kepada wartawan di Semarang, Jumat (30/12). Sejak awal bergulirnya program insentif untuk guru ngaji dan guru Madin pada 2019 lalu, jumlah guru ngaji dan madin yang menerima insentif

terus bertambah tiap tahunnya. Di 2019, sebanyak 171.131 guru ngaji dan madin yang menerima insentif. Jumlah itu bertambah jadi 204.125 di 2020 dan bertambah lagi di 2021 menjadi 205.655 penerima. Ganjar mengatakan, insentif itu merupakan komitmen Pemprov Jawa Tengah untuk menyejahterakan pengajar keagamaan. Di akhir 2022, Gan-

jar melakukan percepatan serapan anggaran agar insentif tersalurkan.

"Akhir tahun kita genjot semuanya. Pokoknya OPD-OPD yang masih merah, belum selesai, sekarang kita genjot. Beberapa hal yang bisa kita kejar, kita kejar. Termasuk eksekusi untuk insentif guru ngaji dan madin," tegas Ganjar.

Mantan anggota DPR RI itu mengatakan, penyerapan anggaran tidak sulit dilakukan dengan birokrasi profesional. Dalam dua minggu terakhir, Ganjar meny-

ebut pihaknya terus menggenjot penyerapan anggaran dari program-program lain. Di 2022 yang tinggal dua hari ini tetap dilakukan percepatan penyerapan anggaran dan pendapatan. Menurut Gubernur Jateng dua periode itu, penyerapannya sudah hampir rampung. Ia mengungkapkan, saat ini penyerapan sudah mencapai lebih dari 80 persen dan pendapatan di angka sekitar 97 persen. Ganjar akan memaksimalkan waktu tersisa untuk memaksimalkan serapan anggaran. (Bdi)-f

## Pemkab Temanggung Targetkan Zero Kemiskinan Ekstrem

**TEMANGGUNG (KR)** - Pemkab Temanggung menarget pada tahun 2024 zero kemiskinan esktrim. Saat ini di kabupaten penghasil kopi dan tembako tersebut terdapat sekitar 23.000 KK masuk dalam keluarga dengan kemiskinan esktrim.

Bupati Temanggung Al Khadziq mengatakan kemiskinan esktrim adalah orang miskin tidak punya penghasilan, tidak punya rumah, bisa jadi hidup sebatang kara, mengidap penyakit menahun, dan konsumsi dalam satu hari tidak lebih dari Rp 10.000. "Kemiskinan esktrim ini harus dituntaskan pada 2024," kata Al Khadziq, Kamis (29/12).

Al Khadziq mengatakan itu pada sosialisasi perhub Temanggung tentang pedoman penyusunan APBDes, tentang tata cara pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak (BHP) Bagi Hasil Retribusi (BHR), dan Tentang Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU) Desa Tahun 2023

Al Khadziq meminta pada desa-desa untuk ikut menangani warga yang dalam kondisi kemiskinan esktrim. Dari 23.000 KK kalau dibagi dalam 20 kecamatan, maka per kecamatan kurang lebih 1000

KK dan jika di satu kecamatan ada 10-15 desa berarti satu desa kira-kira ada 100 KK. "Pada Bappeda untuk menyisir satu persatu dan diketahui by address. Saya minta pada Kades juga partisipasi, mereka ini untuk didatangi satu persatu dan dilihat betul masalahnya. Apa lalu solusinya, agar mereka meningkat kesejahteraan," katanya.

Al Khadziq mengatakan Kabupaten Temanggung tahun 2023 sebagaimana diketahui setiap menjelang tahun anggaran yang baru Bupati selalu menerbitkan peraturan bupati tentang tata cara pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak (BHP) Bagi Hasil Retribusi (BHR), Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU). Aturan itu sebagai landasan hukum dalam penganggaran dan alokasi keuangan di desa sehingga tidak ada sakawangan dan kesimpang siuran keuangan dan pembangunan.

Dikatakan alokasi dana desa bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi yang diberikan oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. (Osy)-f

## Sekolah Lansia Salatiga Luluskan 34 Orang

**SALATIGA (KR)** - Sekolah Lansia Kelompok Bina Keluarga Purbaya, Dukuh Salatiga meluluskan 34 orang terdiri 5 laki-laki dan 29 perempuan. Sertifikat kelulusan diberikan oleh Penjabat (Pj) Walikota Salatiga, Sinoeng N Rachmadi, Kamis (29/12). Kepala Sekolah Lansia Purbaya RW VII Salatiga, Sukadi Rahardjo menyampaikan pembelajaran bagi lansia utamanya yang masih produktif adalah untuk mencetak lansia yang sehat mandiri aktif dan bermartabat (SMART). Sekolah ini merupakan sekolah lansia pertama di Salatiga. Yang dipelajari selama sekolah, para lansia ini konsep menjadi manusia tangguh, mengenal penyakit alzheimer, gizi, kesehatan gigi mulut bijaksana dalam memanfaatkan IT. "Kelulusan siswa ditentukan dari kehadiran, keaktifan, dan evaluasi akhir. Dari jumlah 34 siswa tersebut terdiri 5 laki-laki dan 29 perempuan, Alhamdulillah lulus semua," jelas Sukadi Rahardjo.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi (DP3APPKB) Salatiga, Yuni Ambarwati mengungkapkan Sekolah Lansia Purbaya adalah yang pertama di Kota Salatiga. Bagaimana meningkatkan harapan usia hidup. IPM Kota Salatiga adalah tertinggi di Jateng 84,35. Di Salatiga menurutnya, terdapat 24 Bina Keluarga Lansia (BKL) di dan tersebar di seluruh kecamatan. Diharapkan bisa berkembang menjadi sekolah lansia dan Salatiga menjadi Kota Ramah Lansia. Selanjutnya bagi yang sudah lulus nantinya bisa menjadi fasilitator di sekolah lansia yang ada. "Yang sudah lulus bisa menjadi fasilitator," kata Yuni Ambarwati. (Sus)-f

## Menko PMK Tengok Kemiskinan Ekstrem di Purbalingga

**PURBALINGGA (KR)** - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengunjungi kawasan miskin ekstrem di Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jateng, Rabu (28/12). Dalam kesempatan itu, Muhadjir didampingi Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengunjungi Kelompok Mekar Melati Indah Kelurahan Purbalingga Kidul. Kelompok tersebut terdiri dari 35 nasabah yang melakukan pinjaman modal untuk berwirausaha.

Muhadjir menyatakan, adanya program Mekaar di desa-desa bisa membantu ekonomi keluarga kurang mampu dari mereka yang miskin ekstrem. Menurutnya, dengan adanya pinjaman modal usaha dari Mekaar akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berusaha. "Program Mekaar di

Kabupaten Purbalingga ini contoh bagus untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu dengan bantuan modal untuk berwirausaha, yang bisa membantu mereka keluar dari jurang miskin ekstrem," ujar Muhadjir.

Seperti diketahui, Program Mekaar merupakan program pemerintah melalui Permodalan Nasional Madani (PNM). PNM Mekaar merupakan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, yang kemudian dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Muhadjir menerangkan, selain melalui program Mekaar, pemerintah juga telah melakukan intervensi kesejahteraan masyarakat melalui skema bantuan sosial, serta dana bantuan Bantep Produk Usaha Mikro (BPUM).

Untuk program Mekaar di Kabupaten Purbalingga telah diberikan kepada

3.839 pengusaha kecil yang berada di desil 1-4 yang mana 40,2% nya adalah mereka yang berada di desil 1. Program BPUM di Purbalingga telah mencakup 37.581 keluarga desil 1-4 (sekitar 27%). Desil adalah kelompok persepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Makin tinggi angkanya (skala 1-10) berarti makin sejahtera. "Upaya ini dilakukan pemerintah untuk melepaskan masyarakat dari kondisi mistri ekstrem dan supaya masyarakat bisa mandiri dan berdaya ekonominya," ucapnya.

Dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Purbalingga dilakukan pula melalui tiga strategi. Yaitu pengurangan beban, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan yang dilakukan secara keroyokan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun para pihak non

lembaga pemerintah. Sumber pembiayaan melalui APBN, APBD, APBDes, dan Potensi nonpemerintah (filantropi, CSR, Baznas).

Kemudian, untuk mengurangi kantong kemiskinan ekstrem dari aspek lingkungan, juga perlu dilakukan upaya untuk membenahi lingkungan. Seperti yang telah dilakukan pada tahun 2021, yakni memberikan bantuan bedah rumah sebanyak 2009 rumah tidak layak huni dengan nilai bantuan Rp 12 juta per rumah. Kemudian juga

pemerintah Kabupaten Purbalingga telah memberikan bantuan sarana prasarana air bersih dan sanitasi.

Muhajir juga melakukan pemberian secara simbolis memberikan bantuan sembako, bantuan usaha produktif BPUM, bantuan perbaikan jamban (jambanisasi) kepada rumah tangga dengan fasilitas sanitasi yang kurang layak, dan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni kepada penduduk miskin di Kelurahan Purbalingga Kidul. (Ati)-f



Rombongan Menko PMK mengunjungi warga yang mengalami kemiskinan ekstrem.